

Redaksi

Penanggung Jawab:
Dyah N.K. Makhijani
Pemimpin Redaksi:
Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana:
Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Dedy Irianto,
Risanthy Uli N

Alamat Redaksi

Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317,
3817187
email : humasbi@bi.go.id,
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Foto: "Uluwatu Sunset"
- Made Yoga



gerai info

Edisi XIII | April 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

MEJA REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Masyarakat kerap bertanya, mengapa Bank Indonesia yang nota bene adalah bank sentral yang mengurus sektor moneter kok ya ikut report-report memberi perhatian pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kontaran pertanyaan ini jamak diajukan karena masyarakat melihat kehadiran BI dalam berbagai kegiatan terkait UMKM.

Kondisi itulah yang mendasari redaksi Gerai Info mengungkap tema UMKM pada edisi April 2011. Pembaca akan diajak menelusuri keberadaan UMKM, peran dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional hingga mengapa BI sampai ikut *care-care* memajukan UMKM bersama dengan Pemerintah.

BI adalah mitra bagi Pemerintah dan UMKM. Peran serta BI dalam memajukan UMKM adalah dengan membuka akses ke sektor perbankan dan mengungkap konsep pengembangan UMKM merujuk Program Klaster. Selamat membaca. ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas
Bank Indonesia

■ Peran BI di UMKM:

UMKM Sehat Bikin Ekonomi Kuat

“Apakah Bank Indonesia memberikan kredit bagi Usaha kecil,” tanya seorang bapak saat bertandang ke anjungan Bank Indonesia dalam sebuah pameran. Sudah barang tentu pegawai BI yang bertugas di pameran saat itu menjelaskan bahwa sebagai bank sentral yang independen, BI tidak diperkenankan mengucurkan kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun begitu, BI tetaplah memberi perhatian agar sektor riil khususnya UMKM terus bergerak dengan mendorong sektor perbankan untuk mengucurkan kredit.

Mengapa sektor UMKM pantas mendapat perhatian semua pihak termasuk BI? Pasalnya, peran dan andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usahanya yang mendominasi, tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2009, jumlah unit UMKM mencapai 52,7 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 96 juta orang atau sebesar 97,3% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai Rp2.993 triliun atau sebesar 56,5%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor, UMKM menyumbang sebesar Rp162,3 triliun atau sebesar 17,02%.

Lantas siapa saja profil kelompok usaha yang termasuk UMKM? Kalau merujuk UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dinyatakan bahwa yang termasuk Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan nilai kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Sedangkan kriteria Usaha Kecil punya aset tidak lebih Rp500 juta dan omzet hingga Rp2,5 miliar per tahun dan Usaha Menengah memiliki aset Rp10 miliar dan omzet Rp50 miliar/tahun.

Bila melihat peran strategis UMKM tadi, sudah barang tentu banyak pihak berkepentingan ikut andil dalam menumbuh-kembangkan sektor ini. Namun begitu yang paling berkepentingan sudah barang tentu Pemerintah. Sebab, bila UMKM maju akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional akan *ngacir* semakin kencang lagi yang menyertakan dampak ikutan positif yang begitu luas (*multiplier effect*). Selain Pemerintah, pihak yang

berkepentingan memajukan UMKM ya sudah barang tentu sektor swasta selaku pelaku UMKM itu sendiri. Mereka juga dituntut untuk terus mengembangkan diri agar tumbuh dan berkembang menjadi kelompok usaha yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi.

Lantas, apa kepentingan BI ikut *care-care* memikirkan kemajuan UMKM? Begini. BI adalah institusi negara dengan tugas pokok menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin pada angka inflasi. Sebagai otoritas moneter yang independen, BI adalah mitra Pemerintah dalam ikut serta menyokong perkembangan UMKM. Salah satu wujud sokongan itu adalah dengan membantu membuka akses ke sektor perbankan. Selain itu, BI berkepentingan memajukan sektor riil seperti UMKM karena ada kaitannya dengan inflasi. Lho kok begitu? Bukankah masih segar dalam ingatan kita bagaimana gejolak bahan pangan (cabai, telur ayam, beras) menjadi pemicu lonjakan angka inflasi dari sisi pasok (*supply side inflation*) yang berada di luar domain kendali BI. Bank sentral hanya dapat mengotak-atik inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*). Kalau gangguan inflasi bersumber dari sisi pasok ini dapat diredam, sudah barang tentu akan membantu bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Itulah mengapa BI pun terpenggil untuk ikut menjaga agar keberadaan sektor riil (UMKM) ini tidak mengalami gangguan dan terus bergerak maju.

Lalu apa yang bisa dilakukan BI dalam menyokong percepatan pertumbuhan UMKM? Ada dua cara yang ditempuh, yakni melalui sisi permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*). Upaya bank sentral dari sisi permintaan diperlihatkan melalui kegiatan penelitian, pelatihan dan penyebaran informasi. Selain itu, BI juga bisa mempengaruhi dari sisi penawaran dengan membuat regulasi di sektor perbankan agar mereka berminat membiayai UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Bisa dibayangkan bila sektor UMKM ini terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan kualitas (manajemen, keuangan, *output* produk dan pemasaran), ia akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang sudah teruji tahan banting dihajar angin puting beliung krisis ekonomi global seperti yang pernah terjadi di tahun 1998 dan 2008 lalu. Nah, meski terkadang masih saja dipandang 'sebelah mata' toh eksistensi dan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional tetaplah vital dan strategis. Ibarat kata kecil-kecil cabe rawit, meski UMKM kecil ukuran skala usahanya tapi bikin ekonomi kuat. ●

Menyapa UMKM Melalui Sisi Supply & Demand

Kebijakan Sisi Permintaan diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (*bankable*). Kebijakan Sisi Penawaran merupakan upaya BI mendorong dan memberi insentif kepada perbankan untuk menyalurkan kredit ke UMKM.

Arah kebijakan Bank Indonesia terhadap sektor UMKM lebih pada upaya menjembatani kesenjangan informasi antara UMKM dengan perbankan dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pendanaan perbankan. Langkah itu ditempuh BI melalui dua cara yakni mempengaruhi sisi *Demand* dan *Supply* plus upaya koordinasi dengan Pemerintah.

Kebijakan Sisi Permintaan (*Demand Side Policy*)

Kebijakan Sisi Permintaan diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (*bankable*). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penelitian. Hasil riset ini akan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan UMKM ke depan dan juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui *research based policy*. Ruang lingkup penelitian dapat dikaitkan dengan rencana pengembangan UMKM, menggali potensi serta komoditas unggulan di setiap daerah, serta riset isu yang sedang berkembang di masyarakat.

Banyak riset telah dilakukan BI. Misalnya, Penelitian Pola Pembiayaan

(*Lending Model*) untuk sektor UMKM yang bertujuan memberikan informasi tentang beberapa komoditas potensial dibiayai perbankan melalui pola konvensional yang sudah mencapai 112 komoditas atau pola syariah. BI meneliti terkait potensi komoditas unggulan seperti pembenihan ikan lele, pengolahan kulit ikan pari, kecap ikan, budidaya bebek pedaging hingga penelitian isu terkini seperti dampak Perdagangan Bebas ASEAN-China/ACFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015. BI juga membuat Database Profil UMKM dan pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster serta pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).

Kebijakan Sisi Penawaran (*Supply Side Policy*)

Kebijakan Sisi Penawaran merupakan upaya BI mendorong dan memberi insentif kepada perbankan untuk menyalurkan kredit ke UMKM. Pelaksanaan kebijakan ini seperti penerbitan ketentuan, penguatan kelembagaan dan pemberian bantuan teknis kepada petugas bank sehingga lebih mengenal UMKM. Pada

tahun 2010, BI menerbitkan peraturan tentang kewajiban melaporkan rencana penyaluran kredit kepada UMKM dalam rencana bisnis tahunan. Bank sentral juga mendorong *linkage* program antara bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit ke UMKM. BI berencana mendirikan Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM, APEX Bank sebagai pengayom BPR khususnya dalam mengatasi masalah *liquidity mismatch*.

Sudah memadaikah semua upaya BI itu? Rasanya kok belum pas ya tanpa menjalin kemitraan dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, dalam penyaluran kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng sejumlah kementerian. Nah, rupanya perhatian dan upaya tersebut membuahkan hasil dengan terlampauinya realisasi rencana bisnis kredit ke UMKM oleh perbankan nasional per akhir Desember 2010 dari Rp172,9 triliun yang direncanakan menjadi Rp193,7 triliun yang telah disalurkan. Untuk lebih menggenjot koordinasi dan sinergi semua upaya tadi, BI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) UMKM dan sektor riil agar hasil yang dicapai lebih optimal. ●

Bank Untuk UMKM Atau UMKM Untuk Bank? Nyambungin Bank Dengan UMKM



Difi A. Johansyah,
Kepala Biro Humas BI

Bagi ekonomi pembangunan yang bicara mengenai urut urutan kebijakan deregulasi ada pertanyaan yang klasik. Mana sih yang harus diprioritaskan perekonomian untuk berkembang, bank atau usahawan? Apakah bank karena bank tempatnya duit yang bisa dijadikan kredit untuk memacu ekonomi. Atau apakah usahawan karena merekalah yang punya jiwa wiraswasta sekaligus berani mengambil risiko berusaha. Bank butuh usahawan atau kebalikannya, usahawan butuh bank?

Teorinya, *banks follow trade*, artinya bank akan selalu mengikuti (baca : menangkap) arus perdagangan dan investasi. Bank secara naluriah akan mengejar dan mencari kemanapun dimana ada usaha yang tumbuh, baik besar maupun kecil

skalanya. Disitu bank akan menawarkan jasa pembiayaan dan jasa perbankan lainnya kepada dunia usaha yang ada. Tidak usah disuruh-suruh, hubungan bank dengan usahawan akan nyambung sendiri, seperti magnet.

Oleh karena itu, apapun majunya perbankan suatu negara, adanya usahawan yang tumbuh lebih dulu dan berkembang merupakan prasyarat penting. Kebijakan ekonomi dimanapun harus menciptakan usahawan. Menciptakan usahawan ini berarti menciptakan usaha usaha kecil yang akan berkembang karena tidak ada usaha yang langsung jadi gede dari awal.

Itu sebabnya, banyak bank butuh dan selalu mencari informasi dan *data base* nasabah yang baik, apalagi usaha kecil (baca UMKM). Kenapa? Data dan

profil usaha yang sudah besar gampang diperoleh karena sudah dikenal bank. Lagi pula usaha besar mungkin sulit untuk dirayu menjadi nasabah baru dan boleh jadi tidak lagi membutuhkan pembiayaan bank karena sudah punya akses ke pasar modal. Sebaliknya data usaha kecil yang sehat sulit ditemui karena banyak usaha kecil yang belum berhubungan dengan bank.

Bagi bank, menemukan dan mengenali sebuah usaha kecil yang dapat dibiayai dan dikembangkan ibarat menemukan mutiara terpendam. Bank menjadi besar bukan karena dirinya sendiri, tapi justru karena nasabahnya yang menjadi besar. Mengembangkan bisnis nasabah bank sama dengan mengembangkan bisnis bank itu sendiri. Membina dan mengembangkan usaha kecil membutuhkan cara berpikir yang jangka panjang. Pertamanya mungkin sulit karena *tak kenal maka tak sayang*, tapi kalau sudah jalan *maknyuss!* ●

Menggenjot Sektor Riil Melalui Program Klaster



Edy Setiadi,
Direktur Direktorat Kredit,
BPR, dan UMKM BI

Sebagaimana diketahui, penyebab inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari sisi permintaan dan penawaran. Inflasi yang bersumber dari gangguan sisi permintaan (*demand side inflation*) biasanya dikelompokkan sebagai Inflasi Inti (*core inflation*). Disinilah peran utama kebijakan Bank Indonesia (BI) mempengaruhi inflasi. Sedangkan inflasi yang bersumber dari sisi penawaran (*supply side inflation*) dipicu adanya kenaikan harga-harga karena meningkatnya permintaan (barang/jasa) sementara pasok tidak cukup mengimbangi. Selain itu, kelangkaan produksi (barang), meskipun permintaan tidak mengalami peningkatan, dan/atau kenaikan harga yang ditetapkan Pemerintah dapat mempengaruhi inflasi.

Walaupun peran utama BI dalam pengendalian inflasi pada sisi permintaan, namun gejolak harga pada sisi penawaran juga akan berdampak pada inflasi inti. Disinilah mengapa bank sentral

memandang perlu untuk ikut *cawe-cawe* mengupayakan terkendalinya inflasi pada sisi permintaan. Untuk maksud itulah, salah satu upaya yang dilakukan BI adalah mendorong pemberdayaan sektor riil dan UMKM melalui Program Pengembangan Klaster. Mengapa klaster? Pendekatan klaster terbilang strategis karena memberi dampak multiplier lebih besar dan meningkatkan efisiensi karena melibatkan berbagai pihak terkait (Pemerintah dan swasta).

Dalam kaitan pengendalian inflasi, maka dipilihlah klaster dengan sektor/komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Harapannya, fasilitasi yang dilakukan dapat membantu meningkatkan pasok, memperbaiki jalur distribusi/tata niaga barang serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung dan peningkatan infrastruktur. Disamping itu, pemilihan komoditas klaster dapat juga didasarkan pada komiditi unggulan atau yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Berdasarkan definisi, *klaster* pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait. Di dalam klaster diperlukan interaksi atau kerjasama antar-kelompok usaha. Dengan bekerja sama dalam satu *klaster*, maka perusahaan-perusahaan atau industri-industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan mereka bekerja sendiri-sendiri.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, program klaster perlu dilakukan secara terencana dan komprehensif dengan sokongan dari semua pihak seperti Pemerintah, BI dan swasta. Pemerintah berperan menjaga stabilitas makroekonomi dan kebijakan fiskal, perdagangan dan lainnya, mendukung peningkatan kapasitas ekonomi mikro dalam klaster/industri. Langkah ini dilakukan melalui regulasi yang dapat mengurangi *high cost economy*,

menciptakan iklim persaingan yang sehat, membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan maupun penelitian dan pengembangan. Sementara itu, sektor swasta dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan riset, memfasilitasi klaster dengan melakukan kemitraan, bekerja sama dengan pemerintah untuk memasarkan produk-produk industri baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri ataupun fasilitasi lainnya.

Di sisi lain BI berperan mendukung dan memfasilitasi program pengembangan sektor riil dan UMKM dengan menginisiasi program klaster. Hal ini mulai dilakukan melalui *pilot project* pada tahun 2007, dan hingga 2010 telah dikembangkan 35 klaster di 18 Kantor Bank Indonesia (KBI). Komoditas yang dikembangkan meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Hasil pelaksanaan program klaster di 18 KBI tersebut secara umum dapat menjadi suatu bentuk karya nyata.

Berdasarkan pengalaman tersebut, terdapat beberapa *lesson learned*. *Pertama*, perlunya sebuah metodologi atau pendekatan yang jelas dan terukur dalam mengembangkan sektor riil sehingga dapat dibangun sebuah *best practice* yang dapat direplikasi pada program berikutnya. *Kedua*, melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama di wilayah yang akan dikembangkan dan membangun sinergi dengan *stakeholders* terkait lainnya. *Ketiga*, perlunya mengidentifikasi *lead firm (local champion)* dalam klaster yang dapat menjadi mitra tim fasilitator dalam menggerakkan modal sosial dalam klaster. *Keempat*, perlunya membangun modal sosial dalam klaster sehingga dapat meningkatkan peran aktif dari pelaku dalam klaster. *Kelima*, diperlukan *assessment* klaster secara komprehensif sebagai basis data dan acuan dalam menentukan intervensi.

Pada akhirnya pengembangan klaster ini diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga sisi suplai yang juga berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Nah, disinilah arti penting menggenjot sektor riil dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui program klaster. ●

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

NO	SUB SEKTOR/KOMODITAS	WILAYAH
1	Kacang Tanah	Mataram
2	Budidaya Tanaman Tomoe	Mataram
3	Jagung	Kupang, Medan
4	Kapas	Kupang
5	Jeruk Siam Patola	Banjarmasin
6	Jamur merang	Yogyakarta
7	Karet	Jambi
8	Paprika	Bandung
9	Penggemukan sapi	(Kupang)
10	Peternakan sapi	(Yogyakarta)
11	Peternak Lembu	(Medan)
12	Peternakan Kambing Bligon	(Yogyakarta)
13	Rumput Laut	(Mataram, Kupang, Surabaya, Samarinda, Kendari, Palembang)
14	Ikan Mas	(Medan)
15	Kepiting Lunak	(Medan)
16	Ikan kering	(Lampung)

Sektor Industri Pengolahan

NO	SUB SEKTOR/KOMODITAS	WILAYAH
1	Mebel Rotan	Semarang
2	Meubel Kayu	Jakarta
3	Pengolahan Ikan Cakalang Fufu	Menado
4	Opak (pengolahan ubi kayu)	Medan
5	Industri Kelapa	Menado
6	Kelapa olahan	Kendari
7	Emping Mlinjo	Banda Aceh
8	Penyulingan Minyak Cengkeh	Kendari
9	Minyak atsiri	Purwokerto
11	Alas kaki	Surabaya
12	Bordir dan Konveksi	Semarang
13	Industri Bordir	Tasikmalaya
14	Batik Donggala	Palu

■ Kredit Program Pemerintah:

Sepak Terjang BI Sebagai Mitra Pemerintah



Asep Budi Brata,
Analis Kredit Madya
di Direktorat Kredit, BPR,
dan UMKM BI

Bank Indonesia, selalu berupaya mendorong kegiatan yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi. Tercatat lebih dari 40 tahun, BI melalui kebijakan dan programnya berkecimpung dalam kegiatan *financial assistance* maupun *technical assistance*. Sejarah panjang tersebut menunjukkan peran langsung BI dalam mendorong pengembangan UMKM dan koperasi melalui kebijakan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan suku bunga rendah (*subsidized credit policy*).

Pasca UU Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang BI sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.3/2004, bank sentral tidak diperkenankan lagi memberikan kredit likuiditas untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya, peran tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberian kredit program.

Kredit program adalah kredit/pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor prioritas, sumber dananya seratus persen menggunakan dana bank dengan suku bunga rendah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selisih antara suku bunga kredit program dengan suku bunga pasar yang seharusnya diterima oleh bank, disubsidi oleh Pemerintah.

Beberapa kredit program yang diluncurkan oleh Pemerintah antara lain kredit-kredit yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan, misalnya, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, terdapat kredit program yang menggunakan pola penjaminan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang usahanya layak dibiayai (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan bank (*unbankable*).

Dalam pelaksanaan kebijakan Kredit Program, kedudukan BI adalah sebagai mitra kerja pemerintah

yang diharapkan berperan dalam mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit program kepada UMKM yang saat ini realisasinya terbilang masih rendah. Peran tersebut tidak terbatas hanya pada tataran kebijakan di Kantor Pusat, namun juga di daerah yang diwakili oleh Kantor Bank Indonesia (KBI). Sebagai langkah awal untuk mendongkrak tingkat realisasi kredit program, BI melakukan diskusi terfokus dengan bank-bank pelaksana untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengetahui pandangan dan harapan bank tentang Kredit Program.

Bank berpendapat kredit program yang umumnya disalurkan kepada sektor-sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan) memiliki resiko tinggi ditambah adanya anggapan bahwa kredit program adalah hibah. Selain itu jaringan kantor yang terbatas dan kompetensi tenaga *account officer* (AO) bank yang kurang memahami karakteristik risiko usaha di bidang agribisnis.

Langkah yang sama juga dilakukan oleh BI terhadap kementerian teknis terkait. Kementerian merasakan bahwa upaya yang dilakukan bank belum optimal dalam merealisasikan kredit program. Hal ini terlihat dari kurangnya tingkat pemahaman petugas bank di daerah serta tidak adanya panduan dari kantor pusat bank dalam penyaluran kredit program, termasuk distribusi komitmen ke kantor cabang.

Disamping itu, dalam tataran implementasinya di daerah, terdapat kelemahan, antara lain minimnya informasi mengenai kredit program serta peran pemda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kredit program yang berakibat rendahnya komitmen untuk membuat suatu perencanaan pemanfaatan Kredit Program. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kredit program. Permasalahan koordinasi ini menjadi isu khusus yang antara lain dibahas dalam rapat koordinasi antar gubernur seluruh propinsi yang diadakan tahun 2010.

Presiden RI melalui INPRES Nomor 3 tahun 2010 mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan koordinasi dengan KBI dalam menyusun rencana tindak perluasan dan percepatan kredit program di daerah. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi KBI di daerah sebagai mitra kerja strategis memiliki fungsi dan peran yang selalu diharapkan dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut, KBI-KBI diminta berperan aktif mendorong dan memfasilitasi Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan rencana tindak perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Program, melakukan sosialisasi bersama, menyediakan informasi calon debitur potensial, serta mendorong pembentukan forum yang berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran kredit program di daerah.

Menyadari langkah-langkah di atas, BI memandang perlu untuk bekerjasama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Koperasi dan UKM. Tentunya ada hal yang lebih penting lagi dari sekadar penandatanganan MoU, yaitu bagaimana menindaklanjuti MoU dengan kegiatan-kegiatan nyata yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan UMKM.

Upaya yang dilakukan BI, khususnya melalui KBI-KBI, dipandang telah mampu ikut mendorong pemberdayaan UMKM di daerah. Hal ini tercermin dari apresiasi yang diungkapkan seorang pejabat tinggi negara dalam sebuah rapat kerja nasional, “.....Diakui secara jujur bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat vital dan merupakan motor penggerak terutama sekali dengan keberadaan Kantor-Kantor Bank Indonesia di daerah...”. Apresiasi itu membuktikan bahwa sepak terjang BI dengan segenap jajaran KBI dalam mendukung bagi kemajuan UMKM sudahlah pada jalur yang tepat. ●

Eksistensi KBI di daerah sebagai mitra kerja strategis memiliki fungsi dan peran yang selalu diharapkan dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

UMKM

Primadona Dengan 'Sejuta' Persoalan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) boleh dibilang kelompok usaha tahan banting. Ketika banyak kelompok usaha papan atas (baca: konglomerat) di Indonesia pada luluhan digempur badai krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, UMKM justru berdiri tegak. Apalagi hal itu disokong fakta bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional yang terbilang besar seperti dalam penyerapan tenaga kerja, terhadap nilai ekspor dan pembentukan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Kenyataan ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung dan motor penggerak perekonomian nasional. Tak heran bila eksistensi UMKM pun naik daun dan menjadi primadona. Sebagai primadona, wajar saja bila keberadaannya sering kali dipakai oleh kelompok kepentingan tertentu sebagai simbol "pro rakyat" yang memiliki "nilai magis" guna meraih simpati publik.

Gambaran indah di atas barulah penerawangan tampak luar. Bila kita mencoba menyelam agak mendalam, mungkin dengusan tarikan nafas panjanglah yang akan sering terdengar.

Maklumlah, pada waktu kita masuk ke tubuh UMKM akan dihadapkan pada kenyataan tumpukan masalah yang tak bisa dibilang enteng untuk diurai. Persoalan klasik dan mendasar yang melilit UMKM adalah tipisnya permodalan, ketidak-jelasan badan hukum formal dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keahlian. Masih ada lagi persoalan lanjutan (*advanced problems*) yang membelit, misalnya, belum optimalnya penetrasi pasar ekspor, lemahnya manajemen keuangan, ketiadaan agunan dan masih kurangnya pelaku UMKM. Tumpukan masalah ini, sering kali menyitukan nyali siapapun berurusan dengan UMKM.

Guna mengurai "benang-kusut" di tubuh UMKM tersebut, Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Pemerintah dalam memberdayakan UMKM pun terpenggil untuk berperan serta dengan dibentuk kelompok kerja (Pokja) Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM BI. Pokja ini bertugas mengarahkan, mengkoordinasi, mensinkronisasi dan memfasilitasi pemberdayaan sektor riil dan UMKM khususnya di lingkungan



Bandoe Widiarto,
Analisis Kredit Madya
di Direktorat Kredit, BPR,
dan UMKM BI

Persoalan klasik dan mendasar yang melilit UMKM adalah tipisnya permodalan, ketidak-jelasan badan hukum formal dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keahlian.

bank sentral mulai dari Kantor Pusat hingga Kantor BI di daerah dalam rangka mendorong pencapaian stabilitas harga dan peningkatan kapasitas ekonomi. Pokja merancang empat pilar yang menjadi landasan penguatan yakni kajian komoditas penyumbang inflasi, koordinasi dan bauran kebijakan sektor riil dan UMKM di pusat dan daerah, pembiayaan sektor riil dan UMKM serta komunikasi dan informasi.

Selain merancang program kerja di internal, BI juga menyadari pentingnya kemitraan dengan Pemerintah selaku pihak yang mendapat mandat UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk melakukan koordinasi, memberdayakan dan mendorong kemajuan UMKM. Nah, ketika landasan hukum, pedoman pelaksanaan, penguatan koordinasi dan pembagian peran dalam pemberdayaan UMKM telah ditata secara apik, tinggal soalnya bagaimana semua itu terealisasi agar sektor UMKM tidak hanya menjadi simbol-simbol populis tetapi tampil sebagai primadona sesungguhnya di kancah perekonomian nasional. Semoga.●

■ Profil Petani Andalan:

Yahya, Sukses Petani Cabai Asal Maros

Yahya tidak pernah membayangkan bahwa dalam sejarah hidupnya akan menginjakkan kaki di Istana Negara di Jakarta dan bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tak menyangka bahwa hanya dengan mengurus tanaman cabai sampai mendapat penghargaan Ketahanan Pangan Nasional pada kategori Tanaman Cabai dari Presiden pada tahun 2010. Awalnya, ia hanya menjajal menanam cabai di lahan yang tak terlalu luas milik mertua di Dusun Sabatang, Desa Toddopulia, Kecamatan Maros, Sulawesi Selatan. Banyak rekan sesama petani mentertawakan Yahya yang menanam cabai karena harga jualnya terbilang murah, Rp250 per kilogram. Namun ia tak putus asa.

Seiring perjalanan waktu, harga cabai pun merangkak naik menjadi Rp2.500 hingga menyentuh Rp12.000 per kg pada

tahun 2003. Melihat harga jual cabai yang terus membaik, banyak petani ikut menanam cabai. Walhasil, ketika panen pun melimpah. Hasil produksi cabai Yahya dan petani lainnya yang terhimpun dalam kelompok tani Sumber Rezeki tidak lagi hanya untuk memasok pasar-pasar di Makasar tapi merambah ke Kalimantan, Ambon dan Papua. Satu kali panen cabai bisa mencapai satu ton dengan masa panen dua kali seminggu atau 25 kali panen setahun. Ketika harga cabai melangit hingga Rp60.000 per kg, Yahya dan petani lainnya ikut kecipratan rejeki. Dari hasil budidaya cabai itulah, Yahya kini memiliki lahan seluas dua hektar.

Kini, Yahya semakin mantap menekuni profesi sebagai petani cabai. Bila menengok kebelakang, awalnya selepas bangku SMA, ia sempat melamar menjadi calon polisi, tapi gagal. Beragam profesi telah ia jajal hingga akhirnya



Yahya,
Petani Cabai Desa Toddopulia,
Kecamatan Maros,
Sulawesi Selatan.



mencoba budidaya cabai setelah melihat sukses petani cabai di Malang, Jawa Timur. Sebagai petani dengan pendidikan memadai, Yahya pun berhasrat mengembangkan kelompok petani Sumber Rezeki dengan membangun kios pupuk, bibit, insektisida hingga membangun gudang cabai. Produksi cabai Yahya dan Gapoktan yang dipimpinnya sudah mengantongi sertifikat Prima 3 yang bermakna produk cabai telah diteliti oleh LIPI dan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan, dan dinyatakan aman dengan level residu bahan kimia di bawah ambang batas.

Kini, produk cabai Sumber Rezeki dan tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan) dimana Yahya duduk sebagai ketua sedang diarahkan dan dikembangkan menjadi lokasi Klaster Cabai Nasional merujuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Bank Indonesia. Dengan semua pencapaian itu, Yahya bersama petani cabai di daerahnya kini bisa tersenyum lebar menatap masa depan.●

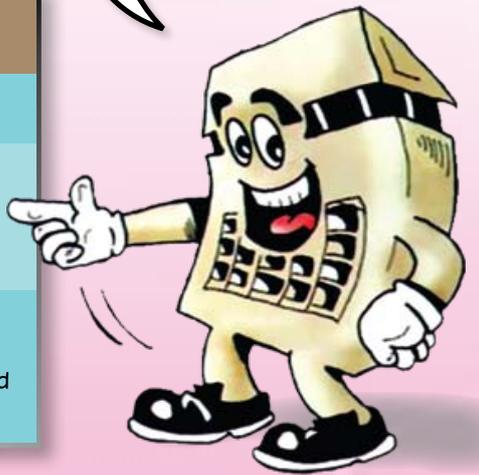
UMKM



Dengan adanya UU No.20 Tahun 2008 tentang **UMKM**, definisi kredit kepada **UMKM** menjadi "kredit yang mengalir/ditujukan kepada usaha produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi)". Kredit konsumsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kredit untuk **UMKM** karena dinilai bukan untuk pembiayaan kepada sektor produktif.

Penghitungan realisasi kredit kepada **UMKM** dalam statistik Bank Indonesia tentunya ikut berubah. Mau tahu lebih banyak soal **UMKM**? Kunjungi saja www.bi.go.id

KRITERIA	UU No.9 Th 1995 ttg USAHA KECIL	UU No.20 Th 2008 ttg UMKM
Usaha Mikro	Belum Diatur	a. Kekayaan Bersih \leq Rp50.000.000,00 <u>atau</u> b. Penjualan Tahunan \leq Rp300.000.000,00
Usaha Kecil	a. Kekayaan Bersih \leq Rp200.000.000,00 b. Penjualan Tahunan \leq Rp1.000.000.000,00	a. Kekayaan Bersih $>$ Rp50.000.000,00 s.d \leq Rp500.000.000,00 <u>atau</u> b. Penjualan Tahunan $>$ Rp300.000.000,00 s.d \leq Rp2.500.000.000,00
Usaha	Belum Diatur	a. Kekayaan Bersih $>$ Rp500.000.000,00 s.d \leq Rp10.000.000.000,00 <u>atau</u> b. Penjualan Tahunan $>$ Rp2.500.000.000,00 s.d \leq Rp50.000.000.000,00



KETAWA ALA BI

Suami Penyayang Uang

Ada seorang suami yang rajin bekerja & sangat cinta kepada semua uangnya sehingga ia berwasiat kepada isterinya, "isteriku, Kalau nanti saya wafat, tolong semua uang hasil jerih payahku dimasukkan ke dalam peti matiku. Aku ingin ditemani mereka di alam sana."

Ketika sang suami meninggal segera isterinya memenuhi wasiatnya.

Dalam upacara penguburan, sang isteri meletakkan sebuah kotak ke dalam peti mayat suaminya, lalu suaminya di dalam peti mati itu dikuburlah bersama kotak tersebut.

Temen sang isteri yang menyaksikan itu berkata, "Bodoh sekali kau, semua uang itu ikut dikuburkan?"

"Ya, sebagai orang beriman, saya harus menepati janji."

"Jadi benarkah semua uang itu kau masukkan ke dalam peti mati suaminya?" tanya temannya lagi.

"Iya lah. Semua uang tersebut saya satukan ke dalam rekening, terus saya bikin cek deh untuk dia sehingga jika dia sewaktu-waktu butuh... kan dia tinggal cairkan saja..."



Menentang

Seorang preman berwajah garang sedang mengendarai motor gede, ketika itu melewati seseorang berparas cantik memakai gaun panjang berdiri di atas jembatan layang.

Ia segera menghentikan motornya dan bertanya: "Apa yg sedang kamu lakukan?"

Jawabnya: "Saya ingin bunuh diri"

Mengambil kesempatan ini sang preman berkata: "Kalau begitu, sebelum kamu melompat, berikan saya pelukanmu yg terakhir."

Si gaun panjang berparas cantik pun memeluk dengan erat dan mesra cukup lama..

Setelah pelukan berakhir, sang preman dengan wajah berseri-seri berkata: "Mengapa kamu ingin bunuh diri? Pelukanmu yang begitu hangat dan menyentuh, tentulah banyak lelaki yg akan tergila-gila kepadamu."

Dengan sedih ia menjawab: "Saya ingin bunuh diri karena orangtua dan keluarga menentang saya berpakaian dan berdandan seperti wanita." ●



BI & Kemenkop Bersinergi Kembangkan UMKM

“Kesepakatan bersama ini merupakan bagian dari upaya BI untuk bersinergi dengan kementerian terkait dalam upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution.



Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan kelompok usaha kecil dan menengah. Urun rembuk kedua institusi ini menyorot upaya mendayagunakan dan mensinergikan sumber daya yang ada di BI dan Kemenkop dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Selain itu, kerjasama ini juga dimaksudkan

untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM.

“Kesepakatan bersama ini merupakan bagian dari upaya BI untuk bersinergi dengan kementerian terkait dalam upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution dalam sambutannya di acara penandatanganan nota kesepakatan antara BI dan Kemenkop tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jakarta, 1 April

2011. Ia mengatakan lebih lanjut, jika membicarakan UMKM tidak akan pernah ada habisnya namun pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan kerjasama ini menjadi sinergi yang positif.

Setidaknya ada tiga ruang lingkup kerjasama BI dan Kemenkop. *Pertama*, upaya peningkatan SDM meliputi pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Inkubator. Selain itu diagendakan pula *sharing* pengalaman dan pengetahuan dalam rangka pembinaan koperasi dan BPR melalui seminar, sosialisasi dan pelatihan bersama. *Kedua*, kegiatan penelitian guna mendukung pengembangan KUMKM. Agenda penelitian ini mencakup aspek pembiayaan, produktivitas, daya saing, nilai tambah dan kualitas kerja KUMKM. *Ketiga*, fasilitasi dan koordinasi dalam mengembangkan lembaga pendukung atau program pengembangan KUMKM. Cakupan yang ingin digarap adalah membangun *hyperlink* dan sosialisasi penggunaan situs resmi BI dan Kemenkop, penguatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya sosialisasi standarisasi laporan keuangan dan pemeriksaan KUMKM. Selain itu, difasilitasi pula penyelenggaraan intermediasi perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan KUMKM melalui *expo*, *bazaar*, *workshop* dan pameran. ●

Membangun Klaster Penggemukan Sapi di Kupang



PBI Kupang, Gubernur NTT, Bupati Kupang, Dirut Bank NTT dalam acara Peresmian Klaster Penggemukan Sapi Kabupaten Kupang.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dulu tersohor sebagai gudang ternak sapi. Tapi kini pamor itu mulai memudar seiring dengan membanjirnya pasok ternak sapi impor. Kenapa begitu? Setelah diteliti

akar penyebabnya, diketahuilah bahwa budidaya ternak sapi di sana masih tradisional, minimnya pengetahuan peternak tentang manajemen dan pakan ternak bernutrisi tinggi serta minimnya sumber pembiayaan perbankan. Selain itu, jumlah ternak sapi terus melorot karena banyak peternak yang menjual sapi betina produktif mereka untuk berbagai keperluan, yang nota bene adalah “mesin” produksi generasi baru sapi di NTT.

Melihat kenyataan itulah, pada tahun 2009, Kantor Bank Indonesia (KBI) Kupang mengajak mitra kerja seperti Pemda setempat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perbankan dan pengusaha ternak duduk bersama mencari solusinya. Pertemuan itu menggagas program kerja bersama guna meningkatkan

kuantitas dan kualitas sapi potong melalui pola klaster. Tindak lanjut pertemuan itu direalisasi dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengembangkan usaha penggemukan sapi dengan proyek percontohan (*pilot project*) di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Untuk menggarap proyek itu digandenglah pengusaha lokal yakni Son Bano selaku pimpinan UD Harapan Baru sebagai avalis bagi kelompok-kelompok peternak.

Melalui pola klaster inilah masyarakat mulai dikenalkan dengan perbankan yang diharapkan akan membuka akses ke sumber pembiayaan sehingga bisa meningkatkan hasil lebih baik. Selain itu, KBI Kupang bekerjasama Dinas Peternakan dan Universitas Nusa Cendana memberi bantuan teknis seperti pelatihan manajemen usaha, pengolahan pakan konsentrat dan pengawetan pakan hingga pengolahan limbah padat bagi peternak sapi. ●

Rumput Laut, Si "Mutiarra Menjalar" Dari Maluku

Melihat semangat yang begitu menyala-nyala dari masyarakat Maluku, Tim KPSRU KBI Ambon mencanangkan daerah ini sebagai Desa Kita binaan Bank Indonesia tahun 2011.



Warga Dusun Wael di Teluk Kotania di Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku kini bisa tersenyum lepas. Ya maklumlah hasil panen rumput laut yang mereka budidayakan kini bisa menjadi andalan sumber penghasilan yang menghidupi keluarga. Enam tahun yang lalu (2004), harga jual rumput laut hanya Rp2.500 per kilogram karena belum ada pembeli potensial. Seiring perjalanan waktu, harga itu merangkak melonjak hingga Rp15.000 per kg akhir-akhir ini. Dengan harga jual yang terus membaik, menyulut semangat Warga Dusun Wael untuk menggenjot produksi

dan kualitas rumput laut.

Warga Dusun Wael mulanya hanya mencoba-coba budidaya rumput laut berbekal bibit dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku di tahun 2004. Setelah mengusahakan rumput laut, harga jual produk pangan sehat itu belumlah memberi harapan membaik yang membuat warga Dusun Wael sempat putus asa. Ditengah situasi yang tak menentu, tahun 2008, hadirilah Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KPSRU) Kantor Bank Indonesia Ambon. Kehadiran KBI Ambon ini

mengusung program inisiatif menggelar program klaster budidaya rumput laut.

Mendengar ada pihak yang hendak membantu mengembangkan budidaya rumput laut, warga Dusun Wael pun menyambut gembira. Betapa tidak. Mulanya warga yang menjadi petani rumput laut hanya memiliki sarana produksi berupa tali *long line* antara 10 hingga 50 buah, kini jumlah itu sudah melonjak antara 20 hingga 100 tali *long line* dengan panjang antara 100 sampai 200 meter. Masalah kekurangan modal pun dijumpai KBI Ambon dengan membuka akses kredit ke PT Bank Maluku Cabang Piru. Melalui skim kredit PUNDI mengalirlah kucuran kredit antara Rp5 juta hingga Rp10 juta untuk 23 petani dengan total nilai Rp230 juta pada tahun 2008. Syukurlah kualitas kredit pun berstatus lancar bahkan sudah ada yang melunasinya.

Kini, warga yang membudidayakan rumput laut jumlah terus berkembang. Bila awalnya hanya tercatat 50 orang petani (kepala keluarga/KK) saja, bilangan itu pun melonjak menjadi 111 orang petani/KK dari tiga dusun di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Melihat semangat yang begitu menyala-nyala dari masyarakat Maluku, KBI Ambon mencanangkan daerah ini sebagai Desa Kita binaan Bank Indonesia tahun 2011. ●

BI di Media



Kredit atau pembiayaan perbankan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus tumbuh. Pertumbuhan terjadi pada bank konvensional ataupun syariah.

Data Bank Indonesia yang mengacu pada besaran kredit menyebutkan, kredit bank konvensional untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Desember 2010 mencapai Rp926,782 triliun. Jumlah ini tumbuh dari tahun 2009 yang mencapai Rp737,385 triliun dan tahun 2008 sebesar Rp633,945 triliun.

Kompas
(20 April 2011)



Tahun 2010, total kredit perbankan tumbuh 22,8 persen. Pada 2011, perbankan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 22-24 persen. Ekonom Mirza Adityaswara pernah menyampaikan, kredit mikro memang menimbulkan biaya operasional tinggi bagi bank. Namun, menghasilkan margin yang tinggi. Apabila rasio kredit bermasalahnya juga cukup rendah sehingga bank memperoleh laba yang lumayan. Dari sisi nasional secara umum, ujar Mirza, berlomba-lombanya bank masuk ke sektor UMKM akan meningkatkan kompetisi.

Kompas
(15 April 2011)

